



**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109  
TAHUN 2012 TERHADAP  
INDUSTRI ROKOK KECIL DI KUDUS**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

**Penyusun:**

**Nama : SUKMA GUNADI**

**NIM : 14010112130058**

**DEPARTEMEN POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2017**

# **IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TERHADAP INDUSTRI ROKOK KECIL DI KUDUS**

**OLEH : SUKMA GUNADI**

## **ABSTRAK**

Industri rokok di Kudus mengalami perjalanan yang panjang, lebih 120 tahun. Dari hari ke hari jumlah industri rokok di Kudus semakin menurun, terutama industri rokok kecil. Pada tahun 2010 jumlah industri rokok kecil di Kudus mencapai 209 unit usaha dan pada tahun 2013 jumlahnya tinggal 33 unit usaha. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan akan membuat pelaku industri rokok kecil di Kudus semakin menjerit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan industri rokok kecil dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga dapat tetap bertahan hingga saat ini.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang di dapatkan berasal dari wawancara langsung dengan pelaku industri rokok kecil di Kudus dan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Kudus dan data sekunder. Pengambilan sampel yang dipilih adalah sistem *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka.

Dampak pemberlakuan PP 109 Tahun 2012 akan membuat industri rokok kecil atau golongan 3 semakin kesulitan dalam melanjutkan usahanya. Karena isi dalam PP 109 Tahun 2012 kebanyakan mengatur tentang tata niaga industri rokok seperti halnya dalam aspek kemasan, bahan tambahan, dan isi yang akan berdampak pada naiknya biaya produksi. Peranan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi dampak tersebut dan mempertahankan eksistensi industri rokok kecil yaitu dengan cara pembinaan dan pelatihan kerja serta pendirian LIK-IHT.

Menyadari betapa besarnya peran industri rokok bagi perekonomian masyarakat Kudus, pemerintah harus melindungi industri rokok kecil di Kudus dengan menerbitkan regulasi yang berpihak kepada industri rokok kecil.. Pemerintah perlu untuk ikut dalam mengatur mekanisme tata niaga tembakau untuk melindungi mereka dari permainan para spekulan harga yang tentunya merugikan para produsen rokok kecil.

Kata kunci : Pengamanan Bahan, Zat Adiktif, Produk Tembakau, Kesehatan, Industri Rokok Kecil

## **ABSTRACT**

*Kudus cigarette industry experienced a long journey, over 120 years old. From day to day the number of the Kudus tobacco industry in decline, especially small cigarette industry. In 2010 the number of small cigarette industry in the Kudus reach 209 business units and in 2013 jumlahnya stay 33 business units. Coupled with the enactment of Government Regulation No. 109 of 2012 on Safety Materials Containing addictive substances such as tobacco products for Health will make a small cigarette industry in Kudus more screaming. This study aims to determine the impact ditimbulkan from the Government Regulation No. 109 of 2012. It also wants to know how the efforts of the tobacco industry are small and Kudus District Government in overcoming the impact of the enactment of Government Regulation No. 109 of 2012 so that it can survive to date.*

*This research method using descriptive qualitative research. Source of data in will come from direct interviews with a small cigarette industry players in the Kudus and the Department of Labor, Industry, Cooperatives and SMEs district. Kudus and secondary data. The selected sampling is purposive sampling system, the sampling technique with a certain consideration. Data collection techniques that can be used in this study were interviews, and literature.*

*The impact of the imposition of PP 109 Year 2012 will make a small cigarette industry or group 3 increasingly difficult to continue its efforts. Since the content in PP 109 Year 2012 mostly regulates the marketing of the tobacco industry as well as in the aspect of packaging, additives, and the content of which will have an impact on production costs rise. Kudus District Government's role in addressing these impacts and maintain the existence of a small cigarette industry is by way of guidance and vocational training programs and the establishment of LIK-IHT.*

*Realizing the enormity of the role of the tobacco industry for the economy of the Kudus society, the government must protect the small cigarette industry in Kudus by issuing regulations that favor small cigarette industry .. The government needs to participate in regulating the tobacco trade regulation mechanisms to protect them from the game of speculators price of course the producers of small cigarette.*

*Keywords: Safety Materials, addictive substances, Tobacco Products, Healthcare, Small Cigarette Industry*

## **1. Pendahuluan**

Industri rokok, khususnya industri rokok kretek merupakan salah satu industri yang pertama lahir dan berkembang serta tumbuh di tengah-tengah masyarakat di negeri ini. Awal mula industri ini berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah, lalu menyebar ke penjuru daerah lainnya. Industri rokok merupakan satu-satunya industri yang berdikari, karena mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi dan konsumsi, semuanya dilakukan di dalam negeri. Industri rokok juga menyerap banyak tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menjadikan industri rokok sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional.

Di tanah kelahirannya, industri rokok berkembang sangat pesat bak jamur di musim hujan. Industri rokok sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan industri besar, sedang, dan kecil. Menurut Badan Pusat Statistik, golongan industri besar merupakan industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang, industri sedang 20-99 orang, dan industri kecil sebanyak 5-19 orang. Jika dilihat dari segi jumlah produksi maka perusahaan golongan besar dengan batasan produksi rokok dua miliar batang ke atas, golongan sedang 300 juta batang hingga dua miliar batang, dan golongan kecil 0-300 juta batang per tahunnya. Industri kecil mempunyai peran yang cukup besar dalam proses pertumbuhan ekonomi terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam

mewujudkan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Terdapat banyak industri rokok baik golongan kecil, menengah, maupun besar yang tersebar di Kabupaten Kudus. Terdapat 3 industri rokok golongan besar, 33 industri rokok golongan menengah, dan 36 industri rokok golongan kecil di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar industri rokok yang ada di Kabupaten Kudus adalah industri rokok golongan kecil dan menengah. Industri – industri rokok tersebut tentunya berperan besar terhadap perekonomian daerah Kabupaten Kudus. Peran industri rokok dalam perekonomian daerah dapat ditinjau dari *value added* yang dihasilkan dalam PDRB. Pada tahun 2014 lapangan usaha industri pengolahan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 81,56%. Pada kategori industri pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah industri pengolahan tembakau yaitu sebesar 91,04%. Hal ini didukung dengan adanya perkembangan hasil produksi rokok dan pendapatan cukai di Kabupaten Kudus. Industri rokok di Kudus utamanya industri rokok kecil menjadi salah satu tiang penyangga dengan industri tembakau.

Kisah industri rokok di Kudus dewasa ini kian memilukan. Kisah pilu tersebut dapat dilihat dari jumlah industri rokok khususnya industri rokok kecil yang terus merosot dari tahun ke tahun, ditambah dengan target penerimaan cukai yang terus naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentu berdampak pada industri rokok kecil atau industri golongan tiga yang mempunyai keterbatasan dalam produksi.

**Tabel 1.1 Perkembangan Industri Rokok Kecil di Kabupaten Kudus tahun 2008-2011**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Unit Usaha</b>	<b>Tenaga Kerja (orang)</b>	<b>Nilai Produksi (Juta Rupiah)</b>
1	2008	562	196.000	843.000
2	2009	239	98.000	358.000
3	2010	209	89.889	259.000
4	2011	173	85.665	227.000

Sumber : Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kab. Kudus

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah industri rokok kecil dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Penurunan jumlah tersebut mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Ditambah lagi dengan adanya regulasi yang mempersempit ruang gerak para pelaku industri rokok kecil tentu akan membuat mereka semakin berjatuh-tak karuan. Jumlah industri rokok yang awalnya mencapai ribuan sampai tahun 2011 tinggal 173 unit saja.

Industri rokok di Kudus mengalami perjalanan yang panjang, lebih 120 tahun. Setelah melewati berbagai kesulitan, bahkan nyaris hancur berkeping-keping dalam periode singkat krisis moneter, industri rokok mampu bangkit kembali dan selama dua dekade terakhir mengecap masa keemasannya. Namun, lagi-lagi, kini industri rokok dihadapkan tantangan global dalam bentuk hambatan-hambatan perdagangan. Hal tersebut tampak dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Peraturan ini berisi tentang pembatasan peredaran, penjualan, dan promosi iklan serta diversifikasi tanaman tembakau yang dirasakan sangat merugikan industri rokok

di Indonesia khususnya industri rokok kecil dan para petani tembakau dan cengkeh.

Dengan pemberlakuannya Peraturan Pemerintah tersebut yang dikeluarkan pada 24 Desember 2012 dan mulai berlaku pada bulan Juni 2014 tentu memiliki dampak positif bagi masyarakat awam akan tetapi memiliki dampak negatif bagi industri hasil tembakau ataupun petani tembakau. Dalam kasus ini industri hasil tembakau ataupun petani tembakau yang sangat dirugikan dimana terjadi berbagai dampak buruk baik dari aspek kesejahteraan karyawan atau kesejahteraan petani tembakau, selain itu juga dari aspek sosial dan budayanya dimana mereka akan terancam menjadi pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena banyak industri rokok yang dapat saja gulung tikar sewaktu-waktu tanpa waktu yang diduga. Akan tetapi masih terdapat pabrik rokok yang dapat bertahan hingga saat ini dan tidak mengalami kerugian seperti pabrik yang terdapat di daerah Kudus, Jawa Tengah. Ada beberapa industri rokok besar dan industri rokok kecil yang masih bertahan walaupun adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut. Akan tetapi kemungkinan dampak dari pemberlakuan PP tersebut pastilah tetap ada. Maka dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih mendalam dan lebih spesifik dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan khususnya di industri rokok kecil di Kudus, Jawa Tengah. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan industri rokok kecil dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga

dapat tetap bertahan hingga saat ini. Melihat hal-hal tersebut sekiranya perlu juga adanya upaya dari pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 khususnya bagi industri rokok kecil yang perlu mendapat perhatian lebih. Hal tersebut disebabkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan mensejahterakan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin jatuh miskin. Sehingga dalam hal ini juga ingin mengetahui dan meneliti apakah ada peran dari pemerintah dalam mengatasi dampak yang terjadi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

## **2. Teori Dan Metoda**

### **2.1 Teori**

#### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan maupun peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Menurut Robert Eyestone, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan antar pemerintah dengan masyarakatnya (Eyestone dalam Winarnno, 2007). Definisi yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang masih terlalu luas dan kurang spesifik karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa menyangkut banyak hal. Richard Rose mengemukakan bahwa kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-



konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan (Richard Rose dalam Winarno, 2007). Selanjutnya Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arahan tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Carl Friedrich dalam Winarno, 2007).

#### **b. Evaluasi**

Menurut Dwidjowijoto evaluasi merupakan salahsatu mekanisme pengawasan terhadap suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan". Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai sebuah kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi, dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2007). Dalam arti yang spesifik, Dunn menyebutkan evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat kebijakan. (Dunn, 1999) Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua hal yang berbeda. Hal pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan hal yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Lester

dan Steward dalam Winarno, 2007). Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menentukan masa depan kebijakan. Salah satu tujuan sosial dilakukannya evaluasi kebijakan adalah memberikan rekomendasi pada pembuat keputusan agar didapat sebuah perbaikan program di masa yang akan datang.

**c. Dampak**

Dalam memantau hasil kebijakan, Dunn membedakan dua jenis akibat: keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumberdaya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Sedangkan dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. (Dunn, 1999). Gabriel Almond dan G. Bingham Powell membedakan dampak menjadi dua, yaitu bersifat simbolik (*intangible*) dan bersifat materi (*tangible*). Dampak yang bersifat simbolik mencakup penegasan tentang nilai-nilai oleh para elit. Sedangkan dampak yang bersifat materi merujuk pada hasil-hasil kebijakan yang nampak atau dapat dirasakan masyarakat, seperti kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. (Almond dan G. CPowell dalam Winarno, 2007).

**d. Peran Pemerintah**

Ndraha (1995) mengemukakan bahwa peranan pemerintah dalam membangun masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual.

Pemerintah hadir untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakatnya. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, pemerintah tidak bisa lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, dan manajemen.

**e. Industri**

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting bagi suatu daerah. Industri memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan sampai penyerapan tenaga kerja. Industri merupakan sebuah kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menambah nilai barang tersebut.

## **2.2 Metoda**

Pada penelitian Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Industri Rokok Kecil Di Kudus. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Kudus karena di wilayah ini merupakan wilayah dimana pertama kali rokok kretek ditemukan dan bertumbuh kembang hingga masuk ke sendi perekonomian masyarakat.

Subjek penelitian diantaranya adalah Pelaku industri rokok kecil di Kabupaten Kudus yaitu Pabrik Rokok Rajan Nabadi dan Pabrik Rokok Gentong

Gotri serta Kepala Bagian Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

Jenis data pada penelitian ini sumber utama dalam penelitian kualitatif. Semua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang langsung diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber kedua dan tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder didapat melalui laporan-laporan, studi literatur lain seperti dokumen, jurnal, buku, internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi yang jelas. Metode tersebut diantaranya wawancara dan studi kepustakaan.

Dalam penggunaan analisis kualitatif ini, maka pengintepretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman, yaitu model analisis yang memerlukan empat tahapan yang harus dilakukan, tahapan pertama adalah pengumpulan data, tahap kedua adalah reduksi data, tahap ketiga menyajikan data, dan tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan.

Dalam menguji validitas data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi dengan sumber berarti dengan cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi yang didapat dari satu sumber dengan sumber yang lain.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bagi Industri Rokok Kecil di Kabupaten Kudus**

Dampak yang di timbulkan dari PP sangat berpengaruh terhadap industri rokok dengan isi kebijakan yang dinilai sangat merugikan sektor ini. Seperti diketahui industri rokok telah memberikan sumber kehidupan bagi banyak orang yang bekerja di sektor industri ini, salah satunya para petani tembakau sebagai pemasok bahan baku utama dari rokok. Maju dan mundurnya perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok. Melihat hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat ini akankah pengaruh dari dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP Nomor 109 Tahun 2012 ini juga berdampak besar dari apa yang di rasakan dari industri rokok.

Jika dilihat dari hubungan antara industri dengan petani tembakau yang sangat erat hubungannya, yaitu industri rokok sebagai konsumen yang membeli hasil panen dan petani tembakau sebagai penyuplai dari bahan baku utama industri rokok yaitu tembakau. Sehingga menimbulkan saling ketergantungan dan menguntungkan antar keduanya, jelas kebijakan ini sangat berpengaruh juga

terhadap petani tembakau, seperti sebagian petani tembakau yang bekerjasama langsung dengan industri rokok serta memiliki pasar nasional yang luas seperti pertanian tembakau di Temanggung, Kudus, Kendal, Wonosobo.

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan observasi di beberapa industri rokok kecil di Kudus dimana penulis menemukan bahwa rokok berkembang dari usaha rumahan menjadi industri global. Bukan hanya sebagai produk ekonomi, tetapi juga produk sosial dan budaya masyarakat. Kondisi geografis, demografis serta karakteristik sosial, budaya masyarakat yang mendukung perkembangan industri rokok di Kudus.

Perkembangan rokok sebagai industri tidak dapat dilepaskan dari dukungan masyarakat pelaku usaha dalam rantai produksi dan bisnis rokok. Masyarakat di Kabupaten Kudus memiliki hubungan erat secara sosial, ekonomi dan budaya. Rokok, sebagai usaha /industri yang berkembang di Kudus mengandalkan keunggulan tenaga kerjanya.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan, merupakan pukulan berat bagi industri rokok. Didalam peraturan pemerintah tersebut hal yang mendasar adalah ditetapkannya tembakau sebagai satu-satunya yang mengandung zat adiktif. Didalamnya mengatur standarisasi komponen rokok yang terkait dengan aroma, rasa, nikotin dan tar. Pelarangan iklan yang menggunakan papan reklame di jalan protokol, secara melintang. Posisi papan reklame harus sejajar dengan jalan raya. Tarif tunggal cukai rokok yang

hanya membedakan alat produksi yang digunakan, menggunakan manual (tangan) atau mesin.

### **3.2 Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Mengatasi Dampak dari Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012**

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Sumarno selaku Kepala Bagian Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Kudus terkait peran pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan mengatakan bahwa peran pemerintah mengakomodasi, mensosialisasikan peraturan ini, kemudia memfasilitasi. Sedangkan menurut Bapak Adi Sumarno bahwa peran pemerintah dalam melindungi eksistensi industri rokok kecil, mengatakan bahwa kembali kepada bentuk pembinaan, di LIK khususnya. Membuat LIK-IHT yang dipergunakan untuk proses industri rokok kecil, dan itu satu-satunya di Indonesia. Pemerintah hadir dalam rangka melindungi eksistensi industri rokok kecil, selain itu kaitannya dengan UMK (upah minimum kabupaten) peran pemerintah mengambil alih, memerankan bipartid, tripartid dalam rangka pengusulan umk khususnya untuk buruh rokok.

#### **4. Pembahasan**

Garis besar terhadap penelitian ini adalah dampak yang di timbulkan dari PP sangat berpengaruh terhadap industri rokok dengan isi kebijakan yang dinilai sangat merugikan sektor ini karena industri rokok telah memberikan sumber kehidupan bagi banyak orang yang bekerja di sektor industri ini, salah satunya para petani tembakau sebagai pemasok bahan baku utama dari rokok. Maju dan mundurnya perekonomian dan kesejahteraan petani tembakau bergantung kepada industri rokok. Melihat hubungan simbiosis mutualisme yang sangat erat ini akankah pengaruh dari dampak yang di timbulkan dari kebijakan PP Nomor 109 Tahun 2012 ini juga berdampak besar dari apa yang di rasakan dari industri rokok.

Peran pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dengan melaksanakan mengakomodasi, mensosialisasikan peraturan ini, kemudia memfasilitasi.

#### **5. Kesimpulan**

Pemberlakuan PP 109 Tahun 2012 memiliki dampak serius bagi industri rokok kecil di Kudus, baik pada aspek kemasan, isi, dan bahan tambahan. Dengan adanya PP tersebut akan semakin mempersulit industri rokok kecil untuk bersaing dengan industri rokok besar dan sedang yang mempunyai kemampuan finansial yang kuat. Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengatasi dampak dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dimana pemerintah berperan mengakomodasi, mensosialisasikan peraturan ini, kemudia memfasilitasi. Selain itu peran pemerintah dalam melindungi eksistensi industri



rokok kecil dengan cara bentuk pembinaan, di LIK khususnya. Membuat LIK-IHT yang dipergunakan untuk proses industri rokok kecil, dan itu satu-satunya di Indonesia.

**Sumber Buku:**

Dunn, William N., 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ndraha, Taliziduhu. 1995. *Research Teori Metodologi Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med. Press ( Anggota IKAPI ).

**Wawancara :**

Bapak Adi Sumarno selaku Kepala Bagian Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Kudus, wawancara, 12 April 2017